

KATALOG BPS :4102004.3217

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

Kabupaten Bandung Barat

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**Indikator Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Bandung Barat, 2021**

**ISSN** : -  
**Nomor Publikasi/Publication Number:** **3217.2021**  
**Katalog BPS/BPS Catalogue** : **4102004.3217**

**Ukuran Buku/Booksize** : **21 x 29,7 cm**  
**Jumlah Halaman/Number of page** : **ix+43 halaman**

**NASKAH/MANUSCRIPT:**  
**Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**GAMBAR KULIT/COVER DESIGN:**  
**Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

**DITERBITKAN OLEH/PUBLISHED BY:**  
**Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat**  
*BPS Statistics of Bandung Barat Regency*

**Boleh mengutip dengan menyebutkan sumbernya.**  
*Maybe cited with referenceto thesource.*

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
2021**

**Tim Penyusun**

Pengarah : Ahmad Muhammad Saleh, S.E.

Penanggung Jawab : Deni Minarso, SST, M.E.

Naskah : Sely Yuniarti, S.Si., M.E.

Pengolah Data : Sely Yuniarti, S.Si., M.E.

Gambar Kulit : Sely Yuniarti, S.Si, M.E.

Penyunting : Deni Minarso, SST, M.E.

## Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat 2021 menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kabupaten Bandung Barat antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari BPS hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan sarandemi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Bandung Barat, Desember 2021

**Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Bandung Barat**



**Ahmad Muhammad Saleh, S.E.**

# Daftar Isi

Halaman

	Kata Pengantar .....	iii
	Daftar Isi .....	iv
	Daftar Tabel .....	vi
	Daftar Grafik .....	vii
<b>BAB I</b>	<b>Kependudukan</b>	
	1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	1
	1.2 Kepadatan Penduduk .....	3
	1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan .....	3
	1.4 Fertilitas .....	5
	1.5 Status Perkawinan Wanita Usia Produktif.....	6
	1.6 Penggunaan Alat/Cara KB.....	7
<b>BAB II</b>	<b>Kesehatan dan Gizi</b>	
	2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	9
	2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan .....	12
<b>BAB III</b>	<b>Pendidikan</b>	
	3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis .....	14
	3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah .....	16
	3.3 Tingkat Pendidikan .....	17
	3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM).....	19
<b>BAB IV</b>	<b>Ketenagakerjaan</b>	
	4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	23
<b>BAB V</b>	<b>Taraf dan Pola Konsumsi</b>	
	5.1 Pengeluaran Rumah Tangga .....	29

<b>BAB VI</b>	<b>Perumahan dan Lingkungan</b>	
	6.1 Kualitas Rumah Tinggal .....	31
	6.2 Fasilitas Rumah Tinggal .....	34
	6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal .....	35
<b>BAB VII</b>	<b>Kemiskinan</b>	
	7.1 Perkembangan Penduduk Miskin .....	38
	7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) .....	40
	7.3 Karakteristik Pendidikan .....	42
<b>BAB VIII</b>	<b>Sosial Lainnya</b>	
	8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi ....	43

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	18
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	19
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	20
Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat dalam (Rp), 2020 .....	30

## DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 .....	2
Grafik 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019-2020 .....	3
Grafik 1.3 Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020 .....	4
Grafik 1.4 Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020 .....	5
Grafik 1.5 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020 .....	7
Grafik 1.6 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda/Mencegah Kehamilan, Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 .....	8
Grafik 2.1 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bandung Barat (tahun), 2016-2020 .....	10
Grafik 2.2 Persentase Angka Kesakitan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2020 .....	11
Grafik 2.3 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2020 .....	12
Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Penolong Persalinan, 2020 .....	13
Grafik 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	15
Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	15
Grafik 3.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama	

	Sekolah Kabupaten Bandung Barat (tahun), 2016-2020 .....	16
Grafik 3.4	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	18
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2020 .....	23
Grafik 4.2	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Wilayah di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2020 .....	24
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2019 dan 2020 .....	25
Grafik 4.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2019 dan 2020 .....	26
Grafik 4.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2019 dan 2020 .....	27
Grafik 6.1	Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator- Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Bandung Barat, 2020 .....	32
Grafik 6.2	Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Dinding Terluas, 2020 .....	33
Grafik 6.3	Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 -2020 .....	34
Grafik 6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2020 .....	36
Grafik 7.1	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020 (Maret, ribuan orang) .....	39
Grafik 7.2	Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, 2016 - 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan) .....	40
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bandung Barat, 2016 – 2020 .....	41
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bandung Barat, 2016 – 2020 .....	42

Grafik 8.1	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Menguasai/memiliki HP dan Mengakses Internet di Kabupaten Bandung Barat, 2019-2020 ...	43
------------	---	----

<https://bandungbaratkab.bps.go.id>

# 1 Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan negara.

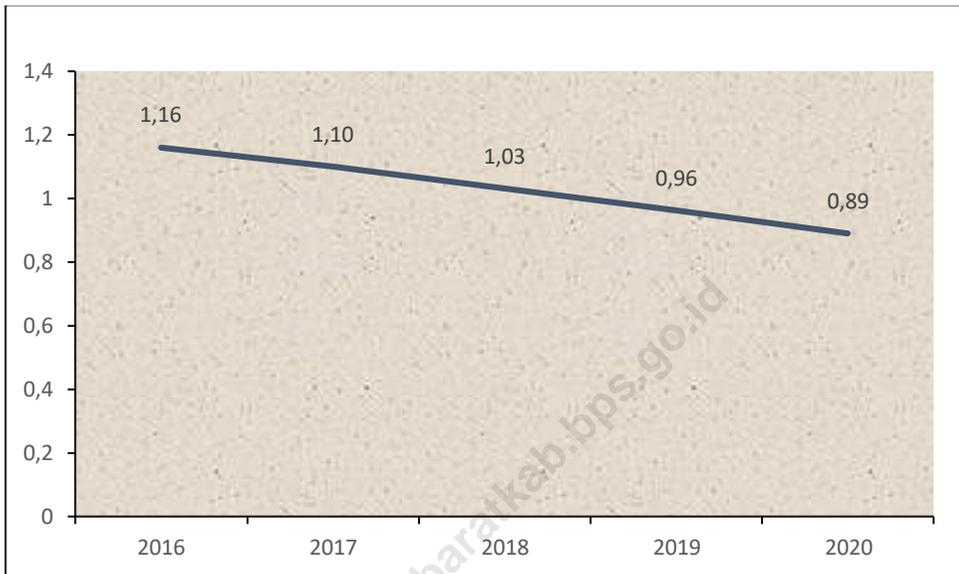
Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin bertambah. Penduduk Kabupaten Bandung Barat berjumlah 1,714 juta jiwa pada tahun 2020.

## 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Dengan banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung Barat kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Sekarang saja yang bisa kita rasakan adalah dari sisi kemacetan lalu lintas, dengan jumlah penduduk 1,714 juta jiwa (proyeksi tahun 2020) kemacetan merupakan suatu hal konkret yang akan dapat dengan mudah kita lihat dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan jumlah penduduk yang besar ini, Kabupaten Bandung Barat tentunya membutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendukung sebagai tindakan preventif dan penyelesaian terhadap masalah kemacetan yang disebabkan oleh kepadatan penduduk yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

**Grafik 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat  
Tahun 2016-2020**



Sumber : Proyeksi Penduduk Jawa Barat, 2010-2020

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.. Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2016 sebanyak 1.648,39 ribu jiwa terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 yaitu sebesar 0,99 persen atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 66,59 ribu jiwa.

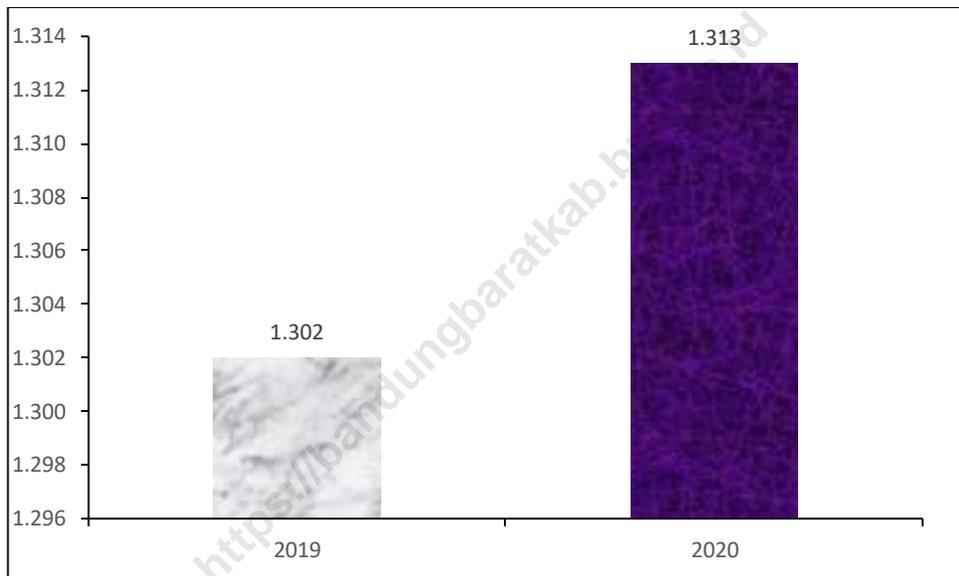
Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 hingga tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami penurunan. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat sebesar 0,89 persen yang mengalami trend penurunan dibandingkan lima tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat sebesar 1,16. Hal ini menunjukkan bahwa trend penurunan yang terjadi, merupakan dampak dari adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat dari tahun ke tahunnya.

## 1.2 Kepadatan Penduduk

Persoalan lain yang terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk, kepadatan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.313 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan tahun 2019 sebesar 1.302 jiwa per km<sup>2</sup> atau naik sebesar 0,85 persen.

**Grafik 1.2 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat**

**Tahun 2019-2020**



Sumber : Proyeksi Penduduk Jawa Barat, 2010-2020

## 1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Komposisi penduduk Kabupaten Bandung Barat jika dilihat dari rasio jenis kelamin, pada tahun 2020 sebesar 102,65. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 103 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

**Grafik 1.3. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020**

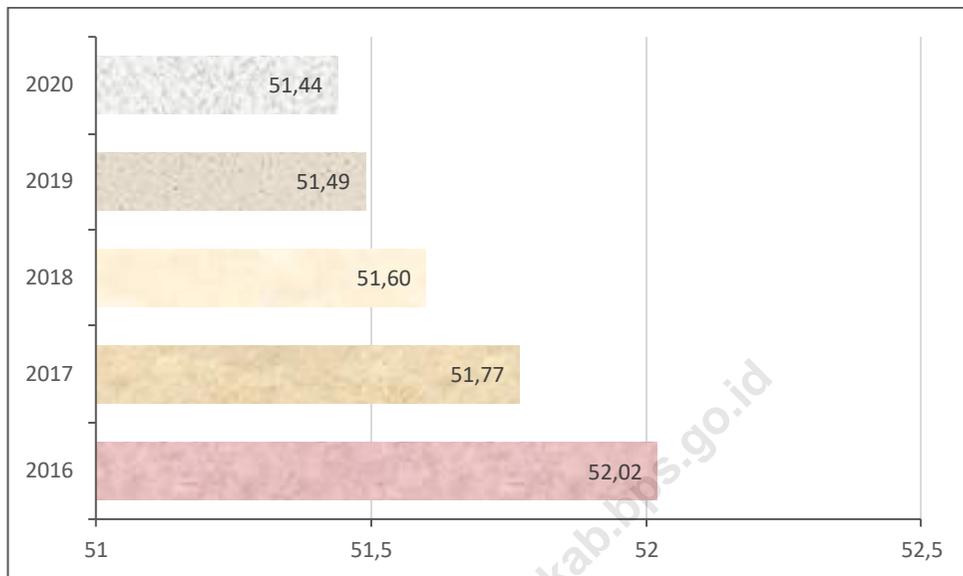


Sumber : Proyeksi Penduduk Jawa Barat, 2010-2020

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) tidak hanya digunakan untuk melihat seberapa besar beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif tetapi juga dijadikan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang.

Angka Beban Ketergantungan penduduk di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebesar 52,02. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 52 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin besar angka beban ketergantungan maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dan semakin besar pula upaya dan hambatan yang harus dilakukan dan ditangani oleh pemerintah setempat.

**Grafik 1.4. Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020**



Sumber : Proyeksi Penduduk Jawa Barat, 2010-2020

#### **1.4 Fertilitas**

Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah. Angka fertilitas yang tinggi bisa menyebabkan penambahan penduduk di suatu wilayah, ledakan jumlah penduduk akan terjadi apabila angka fertilitas yang tinggi tetapi angka mortalitas atau kematian yang rendah.

Menurut Ida Bagus Mantra (1985), terdapat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi fertilitas yang dibedakan atas faktor-faktor demografi dan faktor-faktor non demografi. Faktor-faktor demografi antara lain struktur atau komposisi umur, status perkawinan, umur kawin pertama, keperidian atau fekunditas, dan proporsi penduduk yang kawin. Faktor-faktor non demografi antaranya keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status wanita, urbanisasi dan industrialisasi. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap fertilitas.

Indikator yang digunakan untuk mengukur fertilitas salah satunya adalah Angka Kelahiran Total (TFR). TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya, dan digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah

dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam rangka menekan jumlah kelahiran di wilayah tersebut. Seperti halnya program KB yang sejak dulu sudah dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka kelahiran serta meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi.

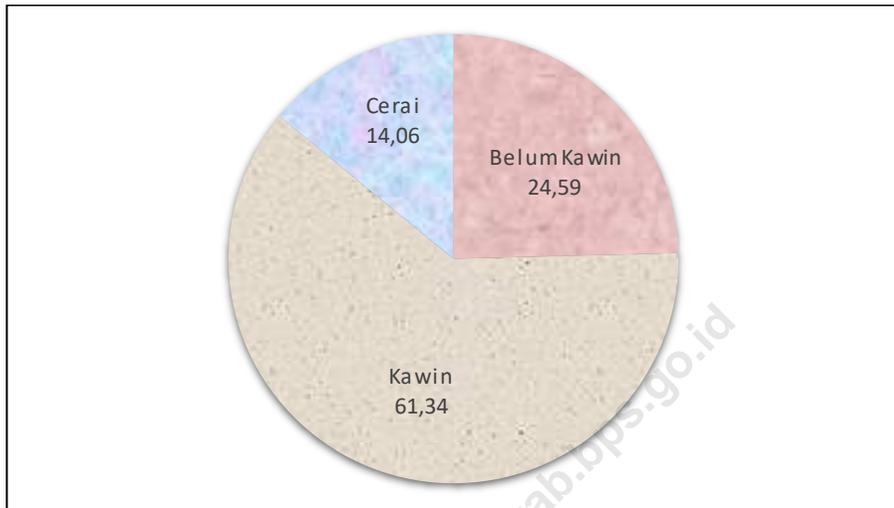
### **1.5 Status Perkawinan Wanita Usia Produktif**

Perkawinan pada usia produktif akan berpengaruh pada penambahan penduduk. Usia Kawin bisa dijadikan salah satu pemicu pertumbuhan jumlah penduduk dimana semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB melalui menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, sebagian besar wanita produktif di Kabupaten Bandung Barat sebanyak 61,34 persen berstatus kawin. Selain itu, persentase wanita yang belum menikah pun relatif besar jumlahnya yaitu sebesar 24,59 persen. Dengan banyaknya persentase wanita usia produktif yang belum kawin, maka diperlukan pendidikan dan pembinaan wanita usia pra-nikah dengan baik. Diharapkan pengetahuan tentang perkawinan, persalinan dan pengasuhan anak dapat tergambar secara lebih baik. Sehingga ketika pada waktunya menikah, wanita tersebut telah memiliki pengetahuan yang baik terkait hal tersebut di atas. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh pada angka kematian bayi dan juga pada angka prevalensi stunting.

**Grafik 1.5. Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2020**



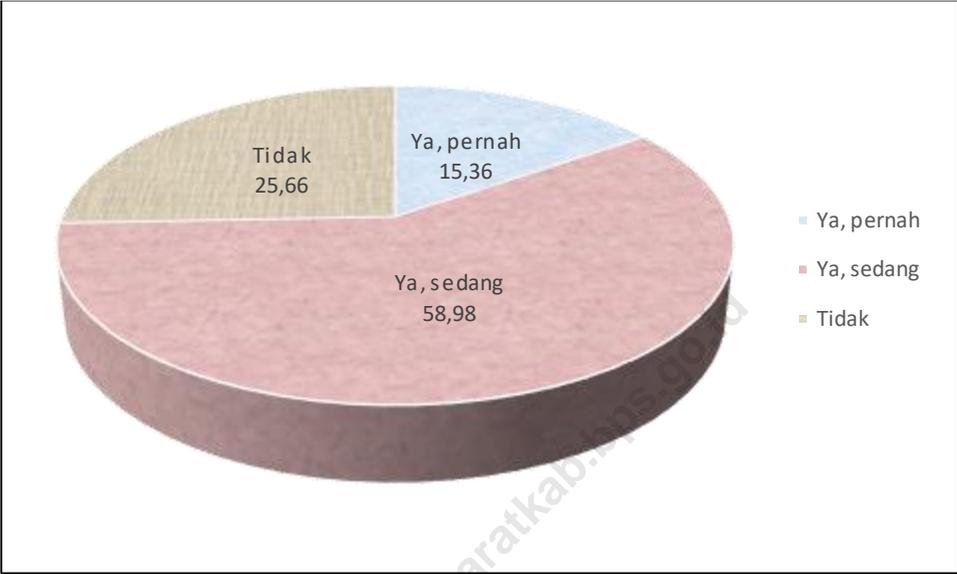
Sumber : Susenas Maret 2020

### 1.6 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah sudah sejak lama menggalakkan program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas. Wujud dari program keluarga berencana adalah pemakaian alat KB atau cara tradisional untuk menunda/mencegah kehamilan. Beberapa alat KB yang sering digunakan diantaranya adalah MOW, MOP, IUD, Suntikan, Susuk KB, Pil dan Kondom. Sedangkan cara tradisional yang digunakan diantaranya adalah metode menyusui alami dan pantang berkala.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat, jumlah wanita usia produktif (15-49 tahun) yang pernah kawin dan sedang menggunakan alat KB atau cara tradisional sebanyak 58,98 persen. Sedangkan yang pernah menggunakan alat KB atau cara tradisional sebanyak 15,36 persen. Sisanya sebanyak 25,66 persen tidak atau belum pernah menggunakan alat KB atau cara tradisional.

**Grafik 1.6. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda/Mencegah Kehamilan, Di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020**



Sumber : Susenas, Maret 2020

<https://bandungbaratkab.bps.go.id>

# 2 Kesehatan dan Gizi

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

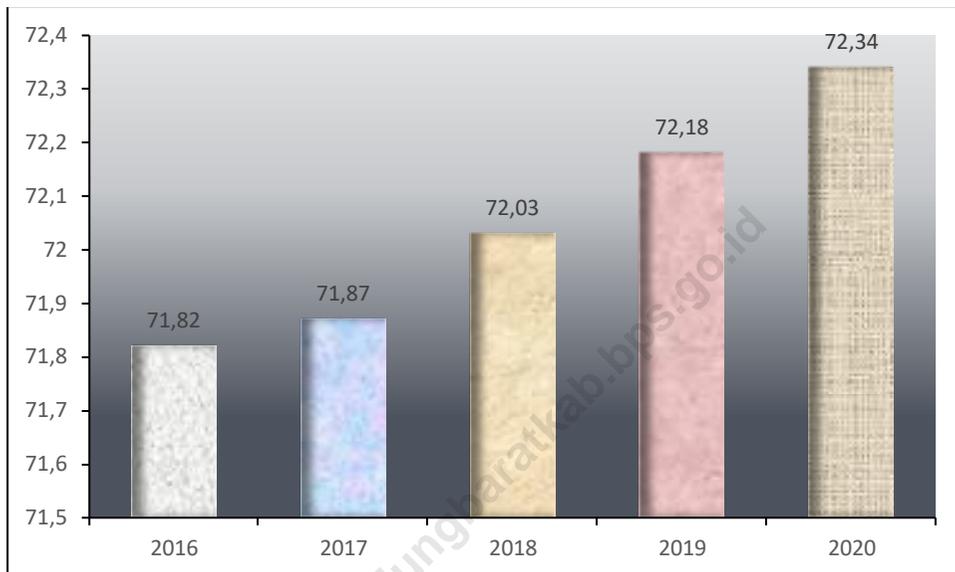
## 2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Salah satu dimensi kesehatan bisa dilihat dari Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2016 hingga 2020, Kabupaten Bandung Barat telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,52 tahun. Pada tahun 2016, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sebesar 71,82 tahun, dan pada tahun 2020 mencapai 72,34 tahun. Semakin meningkatnya umur harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Peningkatan umur harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat,

perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

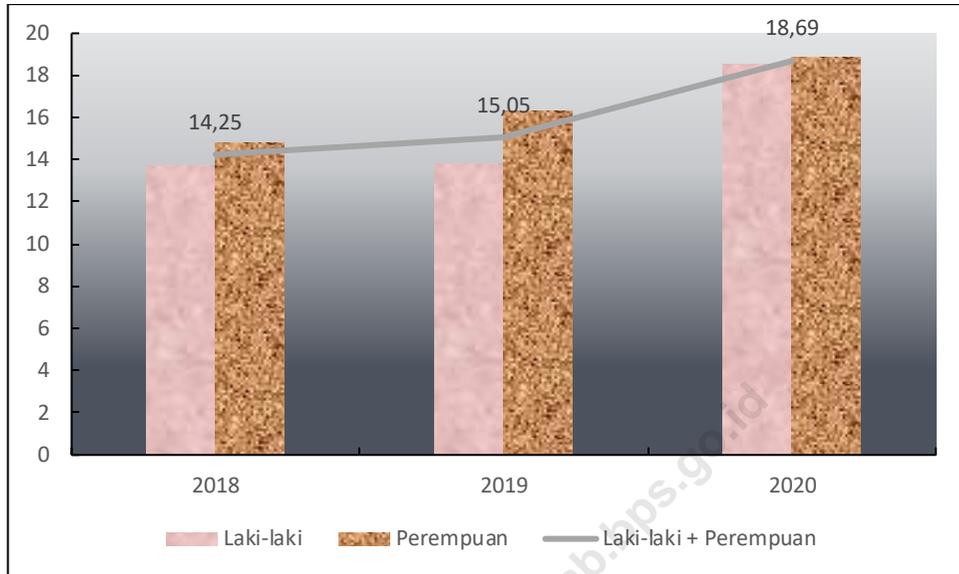
**Grafik 2.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020**



Sumber: IPM, 2020

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik.

**Grafik 2.2. Persentase Angka Kesakitan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2020**



Sumber : Susenas, Maret 2018-2020

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020 persentase penduduk Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 sebesar 18,69 persen sedangkan pada tahun 2019 sebesar 15,05 persen dan pada tahun 2018 yang mencapai 14,25 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang sakit pada tahun 2020 baik laki-laki maupun perempuan hampir sama besar. Penduduk laki-laki yang menderita sakit sebesar 18,52 persen dan penduduk perempuan sebesar 18,85 persen.

Ketika seseorang sakit, maka sudah tentu orang yang sakit tersebut akan mengoptimalkan ikhtiarnya untuk mengembalikan kesehatannya agar aktivitas sehari-harinya tidak terganggu. Berbagai ikhtiar dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keluhan kesehatan untuk mengembalikan kesehatannya salah satunya adalah dengan berobat jalan. Berobat jalan adalah upaya anggota rumah tangga yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke anggota rumah tangga. Akibat dari berobat jalan

tentunya seorang yang memiliki keluhan kesehatan harus membayar biaya berobat jalan selama proses penyembuhannya.

Biaya berobat jalan bisa saja dibebankan secara mandiri kepada pasien atau bisa juga dengan menggunakan jaminan kesehatan. Pada tahun 2018 sampai 2020 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat jalan mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan ketika berobat jalan sebesar 67,99 persen meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 34,26 persen dan pada tahun 2018 sebesar 31,17 persen.

**Grafik 2.3. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat, 2018-2020**



Sumber : Susenas, Maret 2020

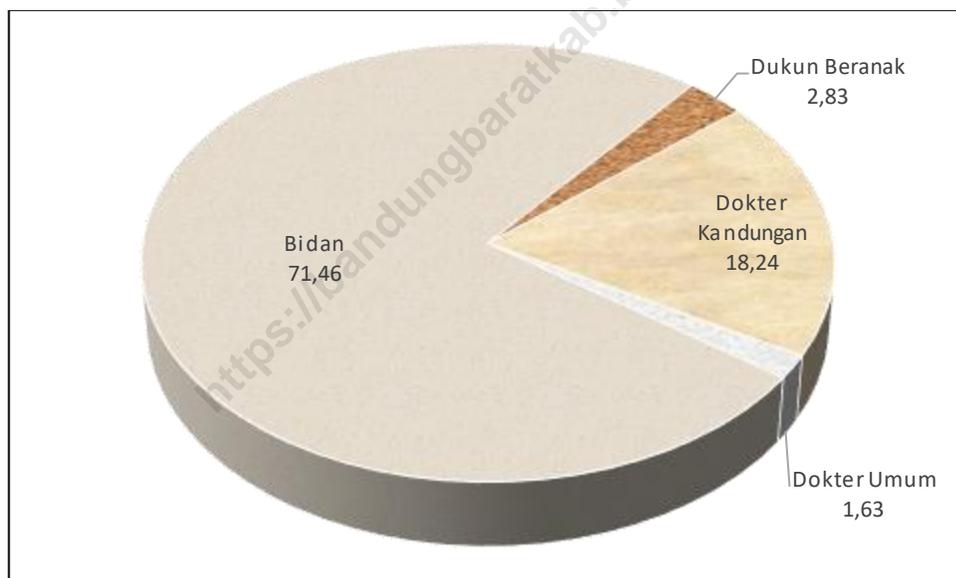
## 2.2 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas tenaga kesehatan sangatlah penting, tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting yang bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program-program kesehatan

salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Di tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat kesadaran akan pentingnya proses persalinan sebagai upaya awal untuk mengurangi tingkat kematian bayi sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari besarnya persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan penolong proses persalinannya hampir seluruhnya ditolong oleh tenaga kesehatan. Dan sebagian besar proses persalinan yang terjadi dibantu oleh bidan, yaitu sebesar 71,46 persen.

**Grafik 2.4. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan menurut Penolong Persalinan, 2020**



Sumber : Susenas, Maret 2020

# 3 Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk *survive* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

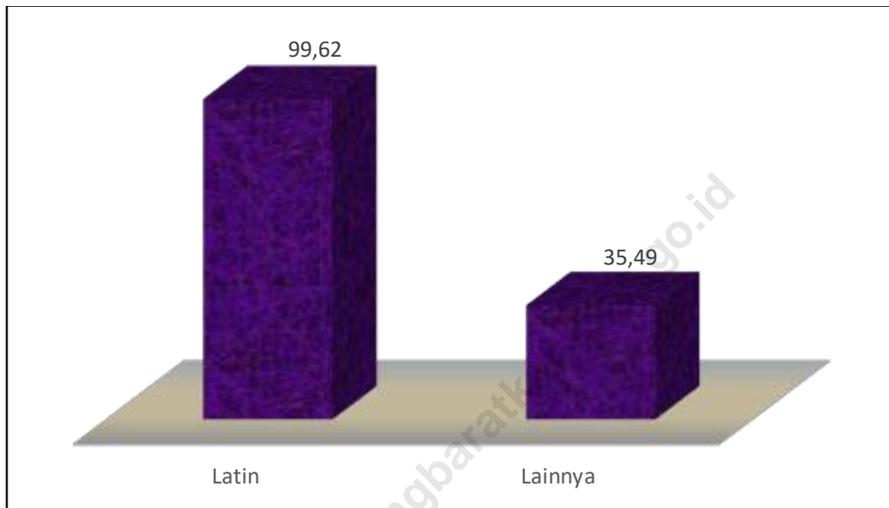
## 3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat sudah cukup bagus, hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2020 yaitu sebesar

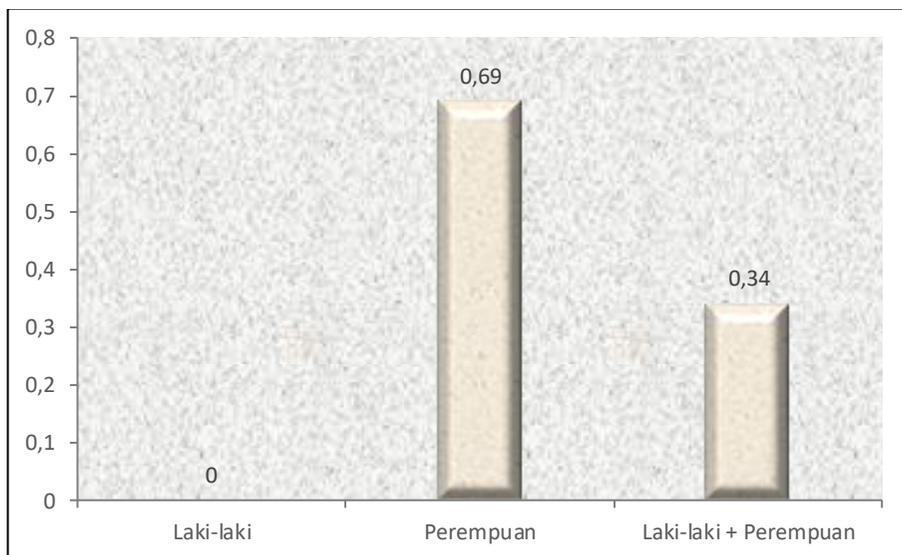
99,62 persen. Sedangkan penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 35,49 persen.

**Grafik 3.1. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis di Kabupaten Bandung Barat, 2020**



Sumber : Susenas, Maret 2020

**Grafik 3.2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Buta Huruf di Kabupaten Bandung Barat, 2020**



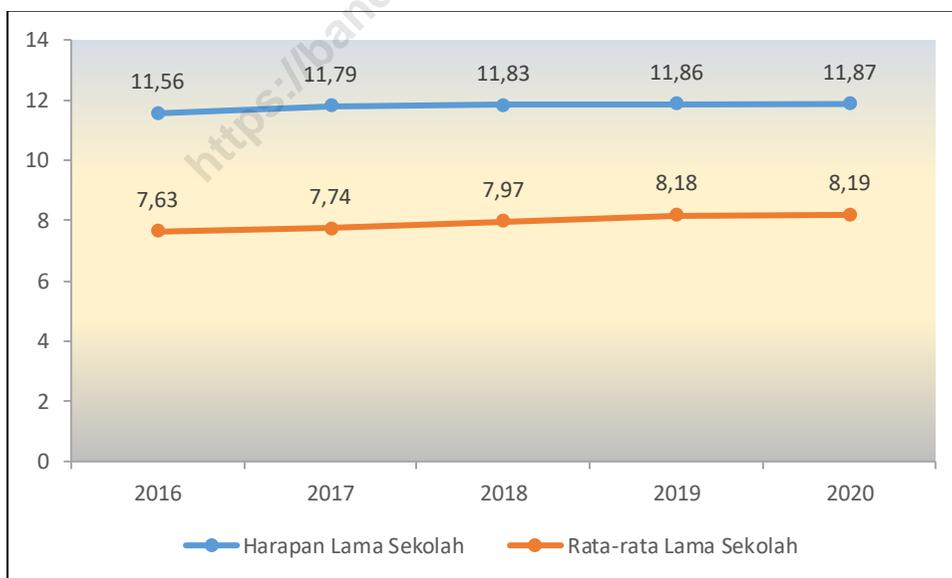
Sumber : Susenas, Maret 2020

Demikian pula dengan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung Barat yang terkategori buta huruf berdasarkan data hasil Susenas 2020 sebesar 0,34 persen. Berdasarkan jenis kelaminnya, perempuan yang buta huruf lebih tinggi dibanding laki-laki yaitu sebesar 0,69 persen.

### 3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat telah meningkat sebesar 0,31 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,56 tahun.

**Grafik 3.3. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020**



Sumber : IPM, 2020

## **Harapan Lama Sekolah**

Selama periode 2016 hingga 2020 Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sekitar 0,66 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat telah mencapai 11,87 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1.

## **Rata-rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bandung Barat tumbuh di atas 1,79 persen per tahun selama periode 2016 hingga 2020. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Bandung Barat usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau SMP kelas II.

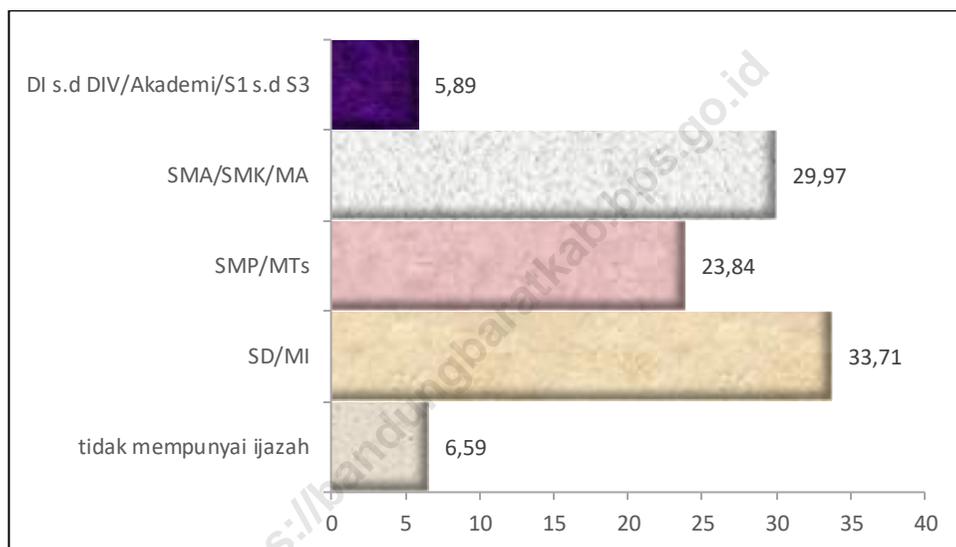
### **3.3 Tingkat Pendidikan**

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas Sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan melalui tingkat pendidikan.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dengan ditandai oleh adanya sertifikat/ijazah. Berdasarkan data hasil Suse nas 2020, persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas dengan ijazah tertinggi SD adalah yang paling besar di Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar 33,71 persen, kemudian di

peringkat kedua adalah ijazah SMA/SMK/MA yaitu sebesar 29,97 persen, dan selanjutnya disusul oleh ijazah SMP/MTs yaitu sebesar 23,84 persen. Hal ini menggambarkan bahwa program pemerintah di bidang pendidikan masih harus terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

**Grafik 3.4. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Barat, 2020**



Sumber : Susenas, Maret 2020

**Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Status Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, 2020**

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi	Jumlah
		SD/MI/ Paket A	SMP/ MTs/ Paket B	SMA/MA/ SMK/ Paket C		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jenis Kelamin</b>						
Laki-laki	0,06	36,13	14,98	13,76	35,07	100,0
Perempuan	0,15	38,48	13,45	15,42	32,50	100,0

Sumber : Susenas, Maret 2020

Persentase penduduk berumur 7-24 tahun menurut jenis kelamin dan status pendidikan menggambarkan bahwa secara persentase kelompok perempuan lebih mendominasi di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/MA/SMK/Paket C, sedangkan untuk kelompok laki-laki mendominasi pada jenjang pendidikan SMP/Mts/Paket B.

### 3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

#### Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kabupaten Bandung Barat, 2020**

Karakteristik	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	99,82	91,53	64,08
Perempuan	99,63	98,05	70,26
<b>Laki-laki+Perempuan</b>	<b>99,72</b>	<b>94,38</b>	<b>66,97</b>

Sumber : Susenas, Maret 2020

Berdasarkan data Susenas di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020, jika dilihat dari jenis kelamin APS kelompok umur 7-12 tahun penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perempuan yaitu masing-masing sebesar 99,82 dan 99,63 persen. Sedangkan untuk APS kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun, APS penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Untuk kelompok umur 13-15 tahun masing-masing sebesar 98,05 dan 91,53 persen. Kemudian untuk kelompok umur 16-18 tahun masing-masing sebesar 70,26 dan 64,08 persen. Secara umum penduduk di Kabupaten Bandung Barat yang berusia 7-12 tahun memiliki kesempatan paling tinggi untuk dapat mengenyam pendidikan dibandingkan dengan kelompok umur 13-15 dan 16-18 tahun.

### Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan Angka Partisipasi Sekolah yang dilihat melalui kelompok umur, Angka Partisipasi Murni atau APM digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kabupaten Bandung Barat APM SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA, hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

**Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, di Kabupaten Bandung Barat, 2020**

Karakteristik	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	98,85	75,90	45,94
Perempuan	96,96	79,45	54,78
<b>Laki-laki+Perempuan</b>	<b>97,87</b>	<b>77,46</b>	<b>50,07</b>

Sumber: Susenas, Maret 2020

Jika dilihat menurut jenis kelamin, APM SD perempuan terlihat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SD laki-laki, masing-masing sebesar 98,85 dan 96,96 persen.

Begitu pula dengan APM SMA perempuan tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMA laki-laki yaitu sebesar 54,78 persen. Sedangkan untuk tingkat pendidikan SMP, APM laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan APM laki-laki yaitu masing-masing sebesar 75,90 dan 79,45 persen. Secara total APM SD di Kabupaten Bandung Barat sebesar 97,87 persen, APM SMP sebesar 77,46 persen, dan APM SMA sebesar 50,07 persen.

<https://bandungbaratkab.bps.go.id>

# 4 Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

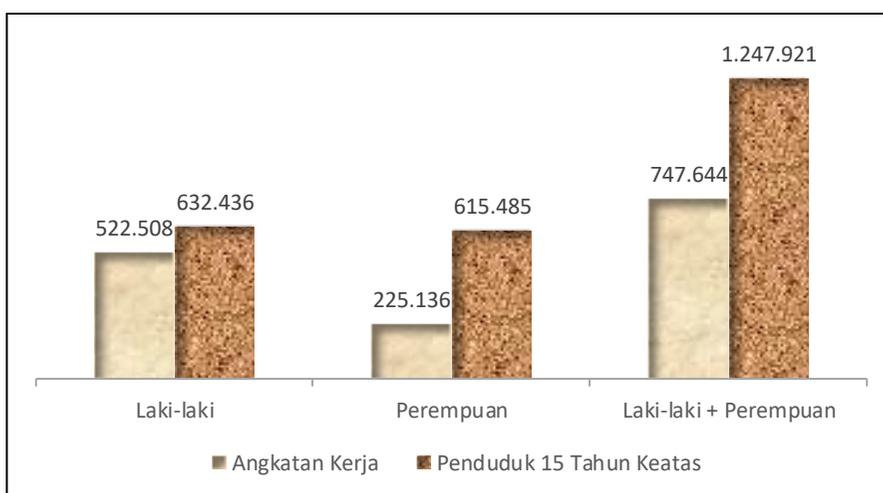
Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2018 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih.

#### 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

**Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2020**



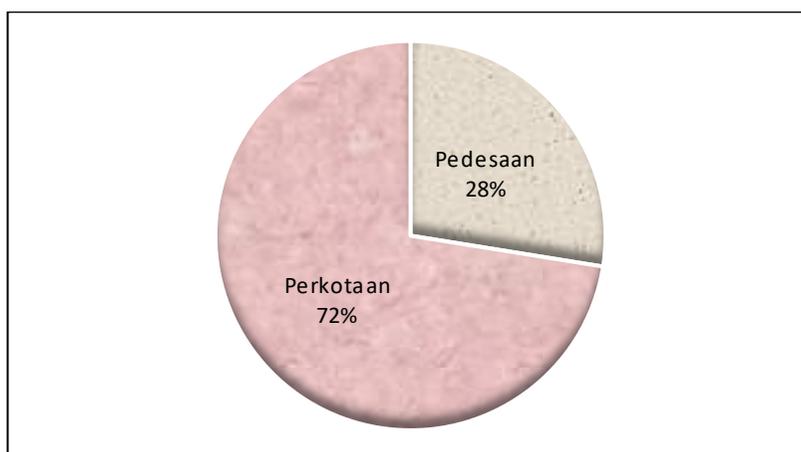
Sumber : Sakernas, Agustus 2020

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kabupaten Bandung Barat Agustus 2018 sebanyak 1,2 juta orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada Agustus 2018 mencapai 0,74 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja mencapai 0,46 juta orang atau 38 persen dari penduduk usia kerja.

Jika dilihat jumlah penduduk usia kerja menurut jenis kelamin pada periode Agustus 2020, jumlah penduduk laki-laki sebesar 632,4 ribu orang atau sebesar 50,7 persen dari total jumlah penduduk usia kerja. Sedangkan untuk perempuan sebesar 615,5 ribu orang atau 49,3 persen dari total penduduk usia kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas 2020, angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh penduduk laki-laki. Dari total angkatan kerja sebanyak 747,6 ribu orang sekitar 70 persennya berjenis kelamin laki-laki dan sisanya berjenis kelamin perempuan. Pada Agustus 2020, sebanyak 87,75 persen dari angkatan kerja melakukan aktivitas bekerja atau sebanyak 656,1 ribu orang. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

**Grafik 4.2 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Wilayah  
Di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2020**



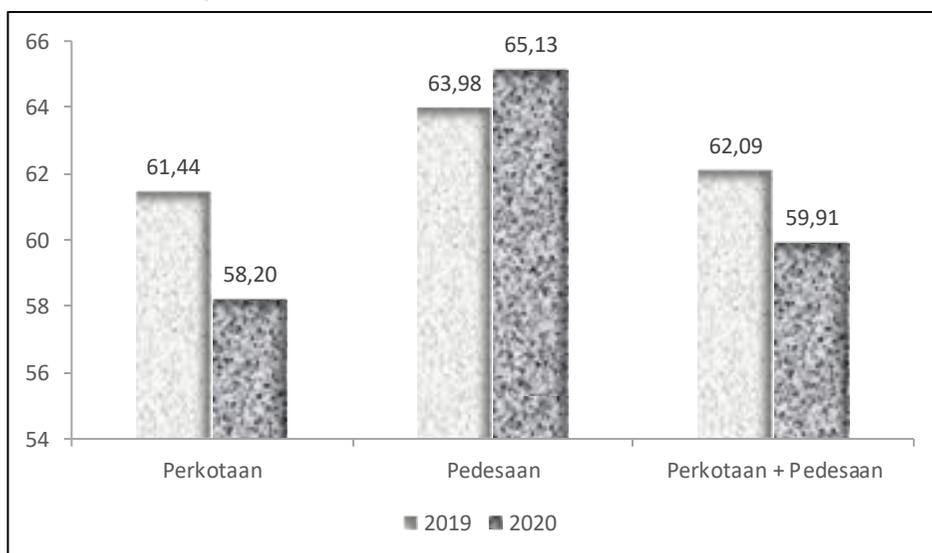
Sumber : Sakernas, Agustus 2020

Jika dilihat menurut wilayah perkotaan dan pedesaan, maka jumlah penduduk bekerja di perkotaan jauh lebih banyak daripada di pedesaan. Pada keadaan Agustus 2020 jumlah penduduk bekerja di perkotaan mencapai 475,4 ribu orang, ada pun di pedesaan hanya sebanyak 180,7 ribu orang.

Dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, secara total terdapat penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2019, TPAK sebesar 62,09 persen turun menjadi 59,91 persen pada tahun 2020. Jika dirinci berdasarkan wilayahnya, penurunan TPAK di perkotaan terjadi dari 61,44 persen pada tahun 2019 menjadi 58,20 persen di tahun 2020. Namun demikian, TPAK di pedesaan meningkat dari 63,98 persen pada tahun 2019 menjadi 65,13 persen pada tahun 2020.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPAK (Payaman J Si manjuntak, 2005:45).

**Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2019 dan 2020**

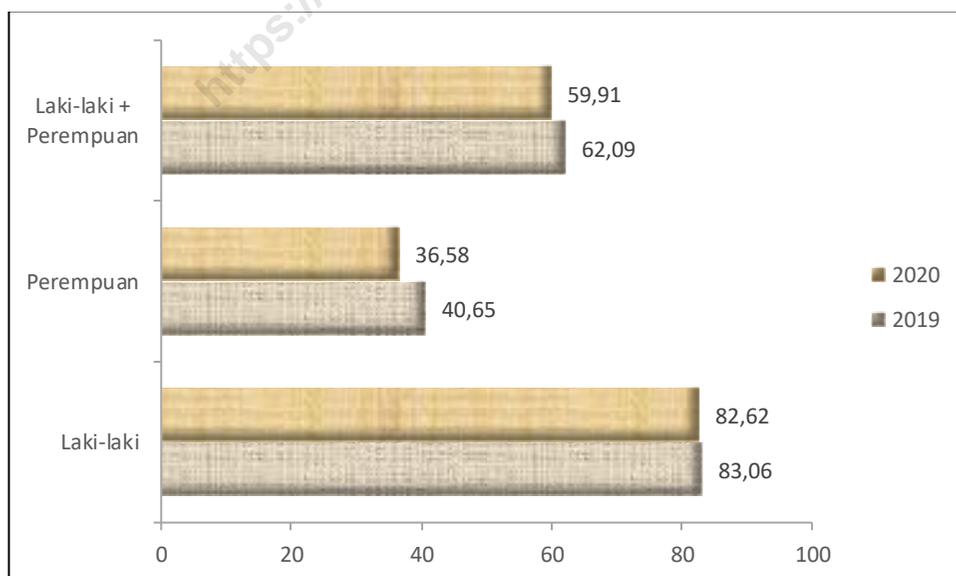


Sumber : Sakernas, Agustus 2019 dan 2020

Adapun jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa selama periode Agustus 2019 hingga Agustus 2020, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Keadaan Agustus 2020, TPAK laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mencapai 82,62 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya mencapai 36,58 persen.

Secara umum TPAK di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 62,09 persen menjadi 59,91 persen. Begitupun jika dilihat menurut jenis kelamin, baik untuk laki-laki maupun perempuan TPAK tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini mengindikasikan menurunnya jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-harinya. Penurunan TPAK perempuan memberikan kontribusi paling besar pada penurunan TPAK secara total di Kabupaten Bandung Barat dibandingkan dengan laki-laki, yaitu sebesar 4,07 persen, sedangkan untuk laki-laki penurunannya hanya sebesar 0,44 persen.

**Grafik 4.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2019 dan 2020**



Sumber : Sakernas, Agustus 2019 dan 2020

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) keadaan Agustus 2020 di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan keadaan Agustus 2019, yaitu dari 8,17 persen menjadi 12,25 persen. Begitupun jika dilihat berdasarkan wilayahnya, baik di perkotaan maupun di pedesaan TPT-nya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk wilayah perkotaan dari 8,55 persen pada tahun 2019 menjadi 13,10 persen pada tahun 2020. Dan untuk wilayah pedesaan dari 7,15 persen pada tahun 2019 menjadi 9,91 persen pada tahun 2020.

**Grafik 4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Wilayah Tempat Tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Agustus 2019 dan 2020**



Sumber : Sakernas, Agustus 2019 dan 2020

Peningkatan TPT ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bandung Barat yang tidak/belum terserap pada pasar kerja. Pandemi memicu terjadinya perubahan pada pasar tenaga kerja dan hal ini turut memberikan kontribusi cukup signifikan pada peningkatan TPT. Banyak sektor yang aktivitas produksinya cukup terganggu dengan adanya pandemi dan pembatasan aktivitas sosial ekonomi yang diterapkan, sehingga mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja. Pandemi yang terjadi menjadi pendorong bagi pelaku ekonomi untuk mengadopsi

teknologi pada tingkatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Untuk dapat bertahan, para pelaku usaha menyesuaikan proses bisnisnya dengan melakukan digitalisasi dan juga mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

<https://bandungbaratkab.bps.go.id>

# 5 Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

## 5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

**Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang dan Golongan Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat dalam (Rp), 2020**

Kelompok Barang	Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan (Rp)					
	Kurang dari 300.000	300.000 - 499.999	500.000 - 749.999	750.000 - 999.999	1.000.000 - 1.499.999	Lebih dari 1.500.000
<b>Makanan</b>	190.697	288.702	413.959	524.498	694.819	1.030.125
<b>Non Makanan</b>	97.764	119.822	198.641	334.685	517.323	1.685.031
<b>Total</b>	288.461	408.524	612.601	859.183	1.212.142	2.715.156

Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2020

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok barang dan golongan pengeluaran. Berdasarkan tabel ini terlihat pada golongan kurang dari Rp. 300.000 hingga golongan pengeluaran Rp. 1.000.000 – Rp. 1.499.999 pengeluaran tertinggi adalah pada kelompok makanan dibandingkan dengan non-makanan. Sedangkan untuk golongan pengeluaran Rp. 1.500.000 ke atas pengeluaran untuk kelompok barang makanan dibawah pengeluaran barang non makanan.

# 6 Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

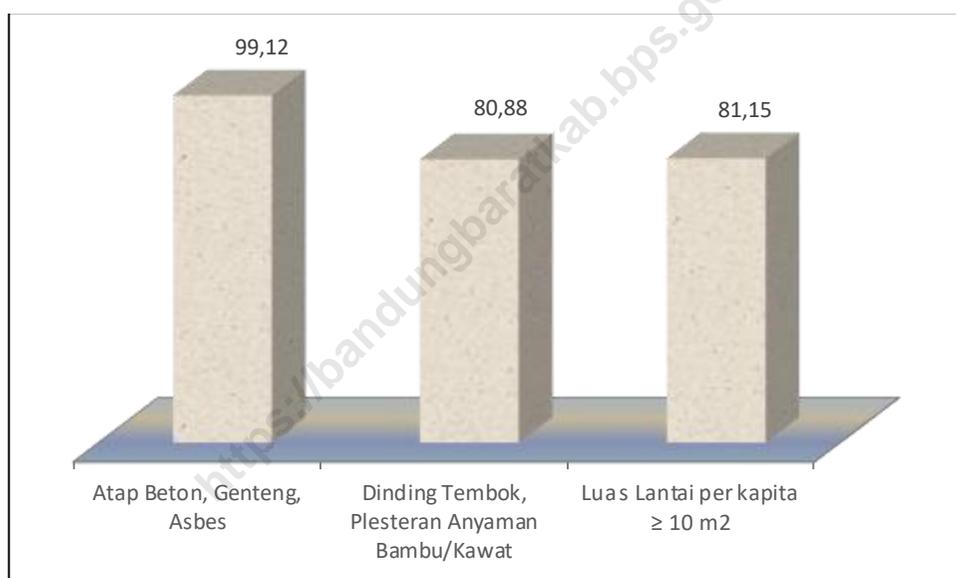
Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu juga dapat rumah menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang makin tinggi, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

## 6.1. Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut

diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu/kawat, dengan beratapkan beton, genteng, maupun asbes. Data hasil Susenas 2020 rumah tangga dengan atap terluas beton, genteng dan asbes mencapai 99,12 persen, sedangkan rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau plesteran anyaman bambu/kawat sebesar 80,88.

**Grafik 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator-Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Bandung Barat, 2020**



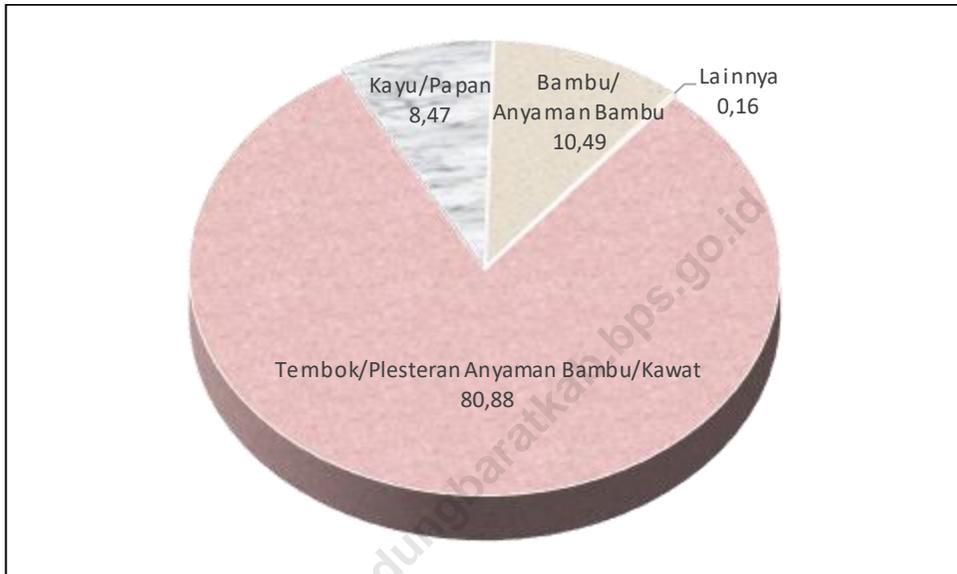
Sumber : Susenas, 2020

Dinding merupakan salah satu komponen penting, karena dinding merupakan penopang bangunan secara keseluruhan. Jenis dinding dapat menunjukkan kualitas tempat tinggal. Tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, kayu dan anyaman bambu merupakan jenis dinding yang baik. Sedangkan batang kayu/bambu atau lainnya merupakan jenis dinding yang buruk karena lembab dan tembus angin.

Data hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa jenis dinding terluas tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh dinding tembok/plesteran yaitu sebesar 80,88

persen diikuti oleh jenis dinding bambu/anyaman bambu, kayu/papan dan lainnya, masing-masing sebesar sebesar 10,49; 8,47 dan 0,16 persen.

**Grafik 6.2 Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2020**



Sumber : Susenas, 2020

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal  $10\text{m}^2$ . Berkaitan dengan kriteria WHO tersebut, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah  $9\text{m}^2$  dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal  $8\text{m}^2$ .

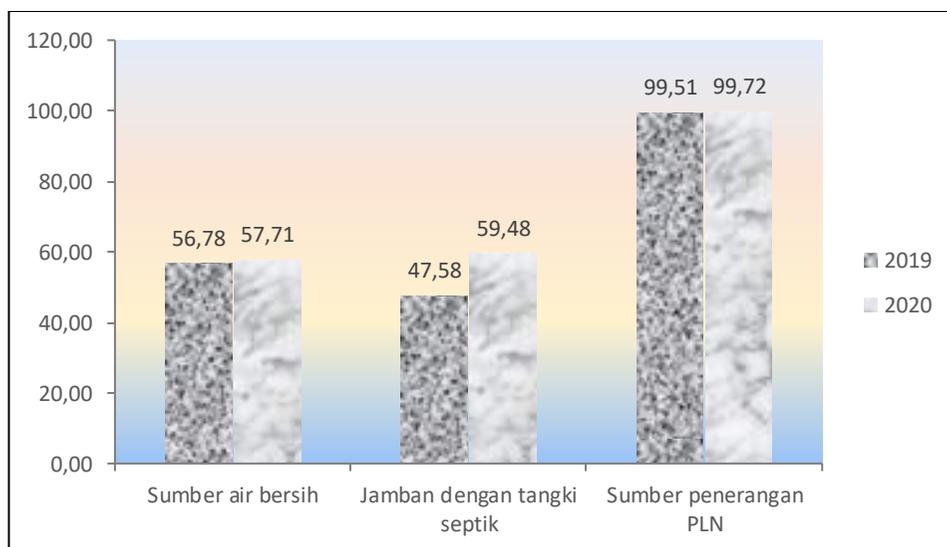
Data hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa di Kabupaten Bandung Barat persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita  $\geq 10\text{m}^2$  adalah

sebesar 81,15 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019 yang mencapai 77,31 persen, maka terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita  $\geq 10 \text{ m}^2$ . Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang relatif seimbang dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat untuk memperoleh rumah yang lebih sesuai dengan banyaknya anggota rumah tangga.

## 6.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

**Grafik 6.3. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 - 2020**



Sumber : Susenas, 2019 & 2020

Rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 yang memiliki akses terhadap air bersih mencapai 57,71 persen, terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 56,78 persen.

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjutnya menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Selama tahun 2019-2020 persentase rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik meningkat dari 47,58 persen menjadi 59,48 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan yang utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa 99,72 persen rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN.

### **6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal**

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri dan bukan milik sendiri, yang terdiri dari kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang. Hasil Susenas 2020 menunjukkan bahwa

rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 83,89 persen, sisanya 16,11 persen adalah bukan milik sendiri.

**Grafik 6.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal, Tahun 2020**



Sumber : Susenas, 2020

# 7 Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan harus menjadi sebuah tujuan utama dari penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia, karena aspek dasar yang dapat dijadikan acuan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah teratasinya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka

sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin".

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

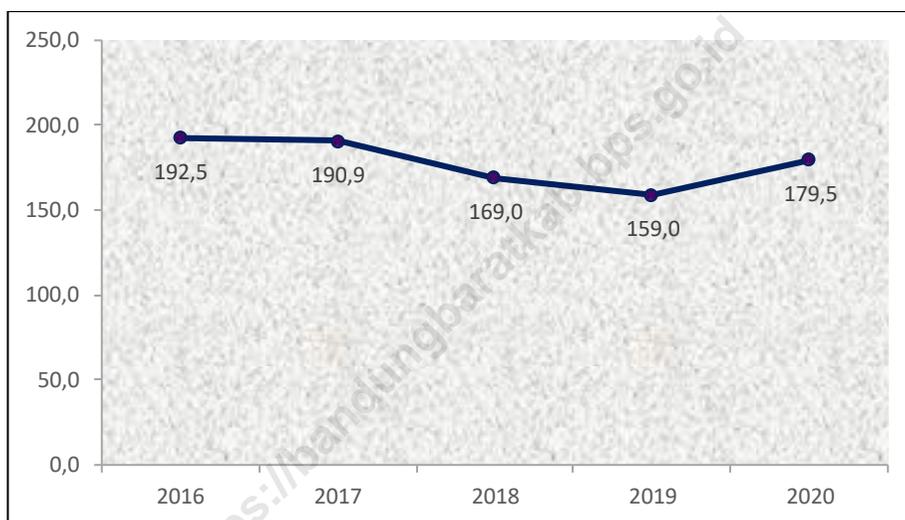
Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Berbagai program pemberantasan kemiskinan dirancang dan diterapkan di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang. Terbentuknya *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai pengganti *Millenium Development Goals (MDGs)* merupakan agenda pembangunan Pasca MDGs yang berakhir tahun 2015. Target yang pertama dari SDGs adalah mengakhiri kemiskinan, dengan beberapa indikator pendukung antara lain menurunkan jumlah orang yang hidup kurang dari \$1,25 per hari. Indikator lain yang terkait dalam mengakhiri kemiskinan antara lain melindungi orang yang miskin dan rentan dengan sistem perlindungan sosial.

## **7.1 Perkembangan Penduduk Miskin**

Penduduk miskin di Kabupaten Bandung Barat secara total menunjukkan tren penurunan selama periode 2016-2019 (keadaan bulan Maret), namun pada tahun 2020 jumlahnya cenderung meningkat. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin sebesar 192,9 ribu jiwa atau 11,68 persen dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Bandung Barat. Angka kemiskinan terus menurun hingga tahun 2019 menjadi sebanyak 159,0 ribu jiwa atau 9,35 persen dari jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan keseriusan upaya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menekan angka kemiskinan ini sehingga angka kemiskinan terus menurun. Namun pada tahun 2020 terjadi kondisi peningkatan angka

kemiskinan, hal ini diperkirakan terjadi karena adanya pandemi sehingga diterapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat secara umum dan mempengaruhi pendapatan serta konsumsi masyarakat, bahkan sampai kehilangan mata pencahariannya. Pada tahun 2020 angka kemiskinan menjadi 179,5 ribu jiwa atau 10,47 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat.

**Grafik 7.1 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung Barat, 2016-2020**  
(Maret, ribuan orang)



Sumber : Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2016-2020

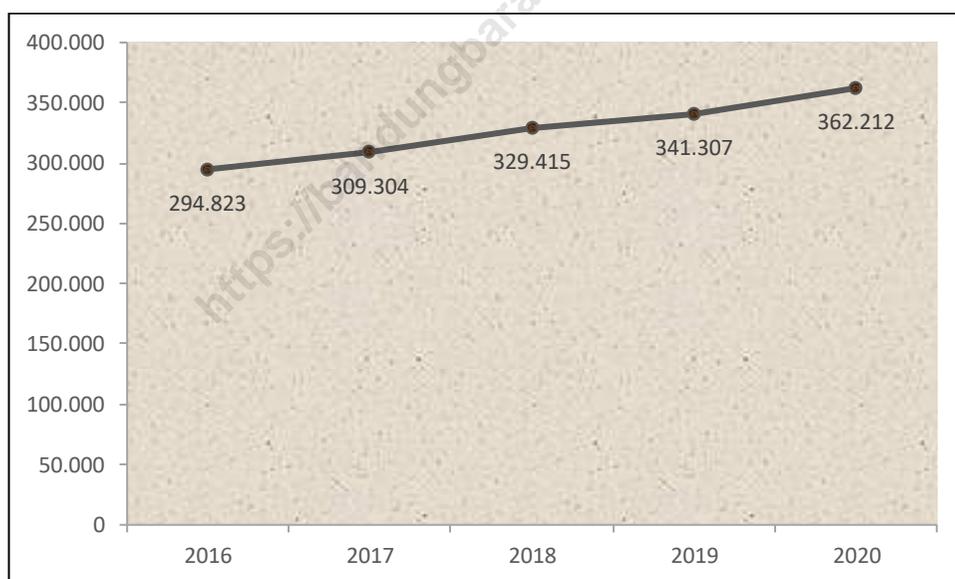
Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga; kondisi perumahan; dan persebarannya menurut kabupaten/kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

Mereka yang paling merasakan imbas dari adanya pandemi adalah masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah. Pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial dalam rangka mengantisipasi potensi peningkatan kemiskinan yang disebabkan pandemi.

## 7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2016-2020, tahun 2016 sebesar Rp 294.823,- dan di tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 309.304,-. Pada tahun 2018 garis kemiskinan mencapai Rp 329.415,-, pada tahun 2019 menjadi Rp 341.307,- dan di tahun 2020 sebesar Rp 362.212,- per bulan.

**Grafik 7.2 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat, 2016 - 2020  
(Rupiah/Kapita/Bulan)**

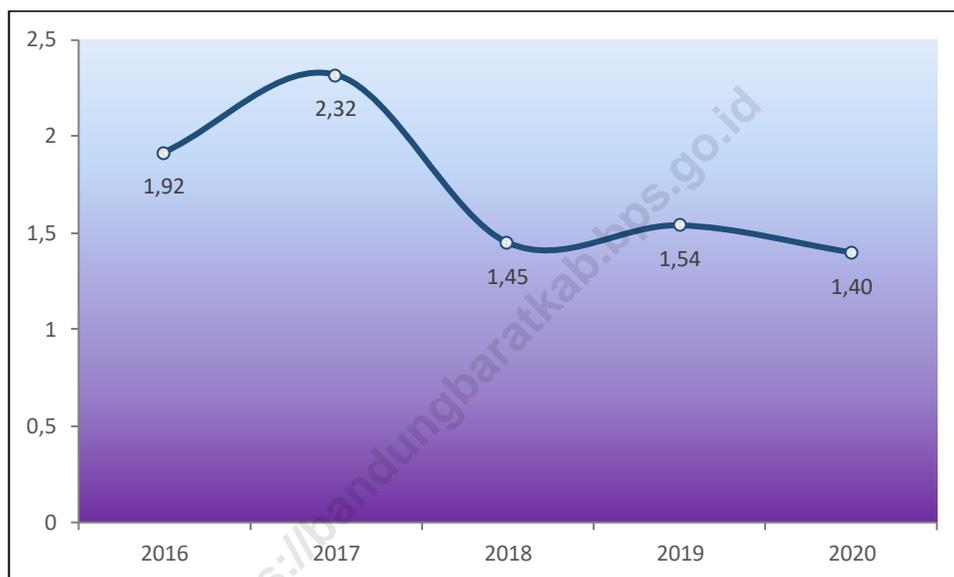


Sumber : Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2016-2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama periode 2016 – 2020 P1 mengalami fluktuasi, dimana nilai tahun 2016 sebesar 1,92 kemudian tahun 2017 meningkat menjadi 2,32. Selanjutnya pada tahun 2018 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 1,45, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1,54 dan

pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 1,40. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

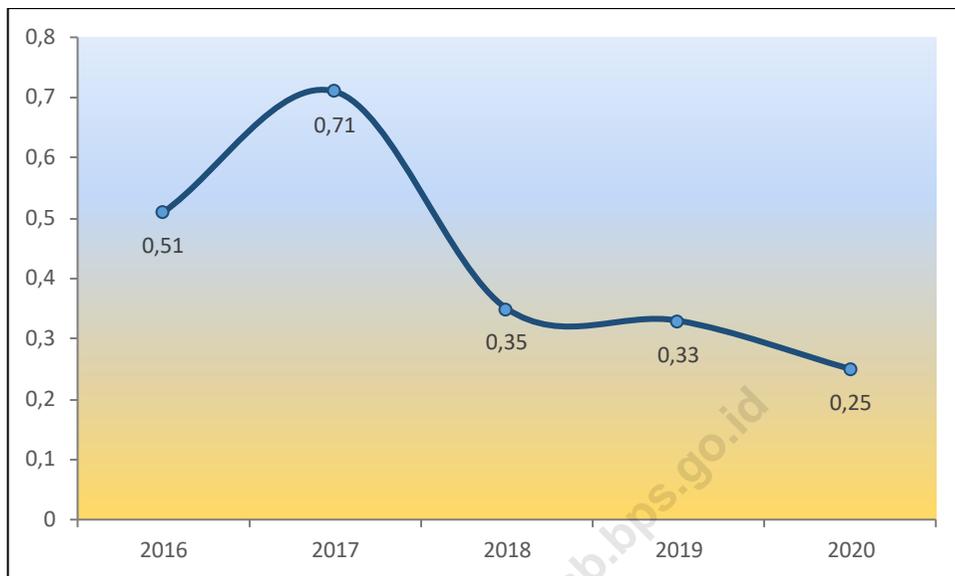
**Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Bandung Barat, 2016 - 2020**



*Sumber: Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2016-2020*

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, P2 juga mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 0,51 dan terjadi kenaikan di tahun 2017 menjadi sebesar 0,71 kemudian menurun cukup signifikan di tahun 2018 menjadi 0,35 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 0,33 sampai 0,25. Penurunan nilai indeks menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

**Grafik 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Bandung Barat, 2016 - 2020**



Sumber: Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat, 2016-2020

### 7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung mengupayakan anggota rumah tangga yang dipimpinnya juga memiliki tingkat pendidikan yang baik. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah tangga cenderung akan memiliki tingkat pendapatan yang semakin tinggi, dan semakin kecil kemungkinan rumah tangga tersebut berada dalam kondisi miskin. Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga yaitu pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang memadai maka besar kemungkinan untuk keluar dari kemiskinannya di masa depan.

# 8 Sosial Lainnya

Pada Bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Cakupan pembahasan meliputi data Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemberian Kredit Usaha dan Pelayanan Kesehatan Gratis serta Korban Tindak Kejahatan.

## 8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

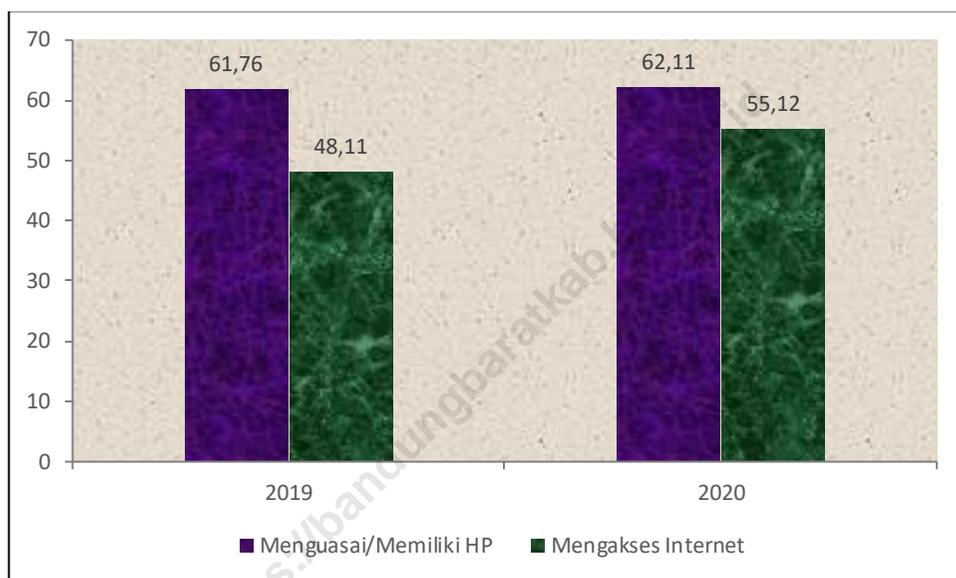
Akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon selular pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti kredit usaha dan pelayanan kesehatan gratis, serta tingkat keamanan wilayahnya. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

Penggunaan internet pada saat ini semakin meluas seiring peningkatan jumlah kepemilikan telepon seluler. Peningkatan penggunaan telepon seluler (*handphone*) cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas alat teknologi informasi berupa telepon seluler. Saat ini mayoritas penggunaan telepon seluler lebih banyak digunakan selain untuk alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses internet. Telepon seluler selain mudah untuk dibawa juga memungkinkan seseorang dapat melakukan

berbagai aktivitas dalam waktu bersamaan. Hal inilah yang membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat terutama dalam mengakses internet dibandingkan dengan perangkat lainnya.

**Grafik 8.1. Persentase Penduduk 5 Tahun keatas yang Menguasai/Memiliki HP dan Mengakses Internet di Kabupaten Bandung Barat, 2019-2020**



Sumber : Susenas, 2019 & 2020

Persentase penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler pada tahun 2020 sebanyak 62,11 persen, meningkat dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar 61,76 persen. Peningkatan kepemilikan telepon seluler juga diikuti oleh peningkatan persentase penduduk yang mengakses internet dengan menggunakan berbagai perangkat khususnya penggunaan telepon seluler untuk mengakses internet semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2020,

# **DATA**

## **Mencerdaskan Bangsa**



***BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN BANDUNG BARAT***